

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan turunan dari suatu fungsi kebutuhan masyarakat serta memiliki peran penting dalam menunjang aspek sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal ini dikarenakan setiap orang memerlukan perpindahan untuk melakukan kegiatan dan menjalankan aktivitasnya. Maka dari itu, keadaan transportasi di suatu wilayah akan mempengaruhi pola ekonomi masyarakatnya. Jika kegiatan ekonomi di suatu daerah terdistribusi dengan baik maka pola pergerakannya transportasi tersebut akan meningkat. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak strategis di perbatasan antara Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa perusahaan yang maju dan menghasilkan produk – produk modern. Dan perusahaan tersebut termasuk salah satu industri yang mampu bersaing di tingkat nasional. Selain itu, Kabupaten Wonogiri juga terdapat perusahaan logistik, perusahaan tekstil dan pasar–pasar tradisional yang dalam distribusi barang tersebut dapat dipenuhi oleh sistem transportasi angkutan barang dan jaringan jalan. Beragamnya jenis barang yang diangkut terjaga kualitasnya. Peran angkutan barang sangat besar dalam menunjang mobilitas distribusi barang di Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri per tahunnya yaitu sebesar 0,48 % serta pertumbuhan kendaraan per tahunnya yaitu sebesar 0,185 %, jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong permintaan (*demand*)

masyarakat akan barang juga. Hal tersebut dapat mempengaruhi penambahan beban volume pada ruas jalan yang akan dilewati dan juga terhadap kondisi ruas jalan dan kinerja jaringan jalan di Kabupaten Wonogiri. Meningkatnya permintaan akan barang didukung oleh kinerja pengiriman barang. Dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Wonogiri berpotensi tinggi pada sektor pertanian. Dimana hasil pertanian tersebut di angkut atau didistribusikan ke beberapa daerah. Pola pergerakan angkutan barang di Kabupaten Wonogiri eksternal-eksternal yaitu dari arah Surakarta menuju arah Ponorogo Jawa Timur. Dari jumlah perjalanan 461 Kendaraan Barang/Hari moda angkutan barang yang biasa melintasi yaitu truk kecil 11%, truk sedang 34%, truk besar 6%. Serta muatan yang diangkut yaitu bahan pokok termasuk bahan makananan (hasil pertanian Kabupaten Wonogiri), pakaian serta beberapa material seperti batu bata dan lain-lain. Hal ini dikarenakan Kabupaten Wonogiri juga sebagai jalur lintasan distribusi angkutan barang yang akan ke Ponorogo dan DIY.

Pola pergerakan angkutan barang yang lalu lintasnya belum efektif menyebabkan kinerja mobilitas barang terhambat. Permasalahan mobilitas angkutan barang di suatu jaringan jalan sering menjadi akibat timbulnya kemacetan karena kendaraan barang mengangkut barang dalam jumlah besar dengan kecepatan relatif lebih lambat dibandingkan dengan angkutan umum. Sering dijumpai pula dalam satu lintasan angkutan barang masih ditemukan kendaraan pribadi dan angkutan umum sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kemacetan. Pergerakan rute angkutan barang belum tertata dengan baik disebabkan belum adanya aturan terkait rute angkutan barang di Kabupaten Wonogiri sehingga terjadinya *mix traffic*. Selain itu, tindakan truk angkutan barang yang melanggar aturan rambu terkait larangan ruas yang dilewati angkutan barang dengan alasan rute yang dilewati merupakan rute terdekat dan terpendek sehingga mengakibatkan kemacetan di daerah kota.

Salah satu ruas jalan yang berdampak yaitu JL. A Yani I , JL. A Yani II yang merupakan akses jalan untuk menuju kawasan perkantoran dan industri yang dilintasi angkutan barang untuk keluar dan masuk Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan survei pencacahan lalu lintas, ruas jalan JL. A Yani memiliki V/C Ratio sebesar 0,73 smp/jam yang termasuk dalam kategori level of service (LOS) C dan dengan kecepatan rata-rata pada ruas jalan tersebut mencapai 16,14 km/jam dan untuk ruas Jl. A Yani II sebesar 0,70 smp/jam yang termasuk level of service (LOS) C dengan kecepatan rata-rata 20,59 km/jam yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan tersebut. Penyesuaian sistem transportasi dan karakteristik daerah perlu dilakukan sebagai penelitian sistem transportasi. komoditi tertinggi yang terdapat di Kabupaten Wonogiri yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri. Pertanian di Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah sehingga menjadi sektor yang mendorong perekonomian masyarakat, potensi tersebut berupa tanaman padi, palawija, dan tanaman hortikultura (statistik, 2023).

Kabupaten Wonogiri terus berupaya untuk meningkatkan prasarana jaringan lintas angkutan barang di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri tahun 2020 – 2040, salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan pelayanan transportasi terutama prasarana angkutan barang yaitu peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah kabupaten serta pengoptimalan sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah . Sebagai pengurangan volume lalu lintas dalam kota dan peningkatan pelayanan dari ruas jalan maka dibutuhkan adanya pengaturan lalu lintas untuk angkutan barang di Kabupaten Wonogiri untuk dialihkan melintasi JLK (Jalur Lingkar Kota). Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian dengan judul : **“PERENCANAAN PENATAAN JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus : Surakarta-Ponorogo)”**. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat diterapkan secara langsung di lapangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah disebutkan, dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingginya volume angkutan barang sebesar 461 Kendaraan Barang/Hari Kabupaten Wonogiri sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja lalu lintas di jalan perkotaan Kabupaten Wonogiri.
2. Terdapat *Mixed Traffic* antara angkutan barang dan kendaraan lain di ruas jalan yang dilewati angkutan barang di Kabupaten Wonogiri dimana pada ruas JL A Yani I angkutan barang yang melintasi yaitu sebesar 26% dan pada ruas JL A Yani II yaitu sebesar 16%.
3. Kinerja ruas jalan A Yani I dan II mengalami penurunan dari sisi kinerja lalu lintas dengan nilai kecepatan sebesar 41,3 km/jam dan 40,29 km/jam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya :

1. Bagaimana pola pergerakan angkutan barang di Kabupaten Wonogiri pada kondisi eksisiting ?
2. Bagaimana kinerja ruas jalan yang dilewati angkutan barang saat ini ?
3. Bagaimana usulan pengalihan rute angkutan barang di Kabupaten Wonogiri?
4. Bagaimana kinerja ruas jalan pengalihan angkutan barang di Kabupaten Wonogiri ?
5. Bagaimana perbandingan kinerja ruas jalan angkutan barang di Kabupaten Wonogiri ?

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dijadikannya penelitian ini yaitu melakukan perencanaan penataan jaringan lintas angkutan barang dengan sedemikian analisis hingga terwujudnya lalu lintas angkutan jalan yang lancar di Kabupaten Wonogiri dengan tingkat kinerja lalu lintas V/C Ratio atau kecepatan tertentu sesuai harapan.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Mengidentifikasi pola pergerakan angkutan barang di Kabupaten Wonogiri pada kondisi eksisting.
2. Mengetahui kinerja ruas jalan yang dilewati angkutan barang saat ini

3. Mengusulkan pengalihan rute angkutan barang di Kabupaten Wonogiri
4. Mengetahui kinerja ruas jalan pengalihan rute angkutan barang di Kabupaten Wonogiri
5. Mengetahui perbandingan kinerja ruas jalan rute angkutan barang di Kabupaten Wonogiri .

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penentuan potensi angkutan barang berdasarkan survei di beberapa perusahaan yang menggunakan angkutan barang.
2. Permodelan transportasi menggunakan software vissum.
3. Penentuan jaringan lintas angkutan barang berdasarkan hasil validasi.
4. Pemilihan alternatif rute menggunakan penentuan ketentuan yang ada dalam pm 96 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.